

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja, 1993, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdhul, Y. (2023) *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber Dan Metode*, Deepublish Store. Available at: <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/> (Accessed: 21 July 2023).
- Abdul Aziz Dumpa, 2014, *Perbandingan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dikabupaten Lawu Ditinjau dari Prespektif otonomi Daerah*, Universitas Hasanudin Makasar, Skripsi.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni, Bandung.
- Atmaja, Dinar Aji, 2016, *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*, Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bambang Trusantono Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan, Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafik.
- BPS Provinsi Jawa Timur. Available at: <https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html> (Accessed: 15 July 2023).
- Dani Pinasang, 2021, "FIlasfah Pancasila sebagai Norma Dasar (grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol XX. No 3.
- Data Dan Sumber data Kualitatif Sumber data - kemdikbud*. Available at: https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf (Accessed: 23 July 2023).
- Derita Prapti Rahayu et al, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta; Thafa Media, Diakses dari [https://www.academia.edu/50777691/Buku MPH 2020 ku ok](https://www.academia.edu/50777691/Buku_MPH_2020_ku_ok)
- Hadjon, Philipus M, 2012, "Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam *Hukum Administrasi dan Good Governance*." *Universitas Trisakti*.
- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharsyah, J. R., & Mahardika, A, 2022, *Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik (Vol. 1)*, UMSU press.
- Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *general Theory of Law and State*; Russel and Sussel, New York, 1971), Nusa Media, Bandung.
- Inna Junaenah dan Lailani Sungkar, 2017, "Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Mansuia", *Padjadjaran Journal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3.

- Inu Kencana Syafie, 2010, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Rafika Aditama, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/atur> yang diakses pada tanggal 14 Juli 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/laksana> yang diakses pada tanggal 16 Juli 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/wenang> yang diakses pada tanggal 16 Juli 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/sumber> yang diakses pada tanggal 14 Juli 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/sumber> yang diakses pada tanggal 16 Juli 2023.
- Kementerian Dalam negeri buku panduan BPD - bappenas. (n.d.). <https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/629/448/05b/62944805bbec5155982232.pdf>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (n.d.), Kasi pemerintahan. Desa Keru | Website Desa Keru. <https://keru.desa.id/organisasi/detail?nid=8985>
- Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.
- Marpaung, L. A. dan SH, M., 2018, *Ilmu negara*, Penerbit Andi.
- Naeni Amanulloh, 2015, Demokratisasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), hlm 26.
- Organisasi, A.B. dan Nardi, A. Sunar, 1970, *Flash back: Membedakan Definisi Pemerintah Dan Pemerintahan*, Biro Organisasi. Available at: <https://biroorganisasi.jogjaprov.go.id/v1/flash-back-membedakan-definisi-pemerintah-dan-pemerintahan/> (Accessed: 14 July 2023).
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peter Malanczuk, 1997, *Akehrts's Moderen Introduction to International*, Seventh Edition, New York.

- Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata.
- R.J.H.M Huisman, Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding, (Amsterdam : Kobra, 1983), hlm.8 dalam Jurnal Susanto, S. N., 2020, Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 430-441.
- RI, K.K. dan I. *Regulasi Tentang Desa: Website desa Dangin Tukadaya, REGULASI TENTANG DESA. Website Desa Dangin Tukadaya*. Available at: <http://dangintukadaya.desa.id/regulasi-tentang-desa> (Accessed: 26 July 2023).
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 21.
- Robi Syafwar, 2017, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Di Kabupaten Agam", Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Rohmiyati, S. W. (2017). *Penerapan Algoritma K-Means dalam Pemetaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten* (Doctoral dissertation, STMIK Sinar Nusantara Surakarta).
- Rohmiyati, S. W., 2017, *Penerapan Algoritma K-Means Dalam Pemetaan Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten* (Doctoral dissertation, STMIK Sinar Nusantara Surakarta).
- Rosidin, Utang, 2019, "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.1.
- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman, 2017, Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*.
- Sarman, Mohammad, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Depok.
- Setiawati, 2018, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1
- Siti Hidayati, 2019, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3, Nomor 2.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sujono, A, 2020, Hubungan Antara Sikap Kepemimpinan Dengan Etika Organisasi: Suatu Tinjauan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1).
- Susanto, Sri Nurhari, 2020, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law and Governance Journal* 3.3 : 430-441.
- Tarigan, Elvida Br, Muhammad Husni Thamrin Nasution, and Rosmala Dewi. "Peranan Sekretaris Desa dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa di Desa

- Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang." PERSPEKTIF 6.2 (2017): 64-74.
- Tata Negara Hukum - Researchgate.* Available at: https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Hidayat-Muhtar/publication/368566140_HUKUM_TATA_NEGARA/links/63ee35a42958d64a5cd5cb31/HUKUM-TATA-NEGARA.pdf (Accessed: 14 July 2023).
- Titik Triwulan, 2010, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, kencana, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014#:~:text=Undang%2DUndang%20ini%20menegaskan%20bahwa,Indonesia%2C%20dan%20Bhinneka%20Tunggal%20Ika>.
- Wawancara dengan Kepala Desa Basin, Bapak Agus Haryono, 1 Maret 2023, di Klaten.
- Wawancara dengan Ketua BPD Basin, Bapak F.A Minarso, 1 Maret 2023, di Klaten.
- Widjaja HAW, 2003, Pemerintah Desa/Marga, PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Wijayanti, D, 1970, *Penerapan Prinsip good governance dalam Pelaksanaan Pelayanan publik di kantor camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Selamat Datang di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository.* Available at: <https://repository.uin-suska.ac.id/13785/> (Accessed: 14 July 2023).
- Winarno, E.S, 1970, *Pengaturan Hak pensiun Dini Bagi Pekerja Tetap, UNTAG SURABAYA REPOSITORY.* Available at: <http://repository.untag-sby.ac.id/1569/> (Accessed: 16 July 2023).
- Yunus, R, 2022, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Humanities Genius.
- Zacharias, T., & Sos, S, 2021, *Filsafat Administrasi*, UWAIS Inspirasi Indonesia.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.